

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Secara teoretis perlakuan akuntansi terhadap penjualan cicilan telah diuraikan di muka. Selanjutnya dalam bab ini akan diuraikan tentang hasil penelitian penulis mengenai kebijakan perusahaan dagang kendaraan bermotor di Kotip Tanjungpinang atas perlakuan akuntansi terhadap penjualan cicilan. Dari hasil penelitian yang diperoleh, akan dilakukan suatu analisis dan evaluasi terhadap perlakuan akuntansi yang telah diterapkan oleh setiap perusahaan dagang kendaraan bermotor di Kotip tanjungpinang yang merupakan responden atas penjualan cicilan.

Dalam hal ini, untuk memudahkan maka penulis akan menggantikan nama perusahaan responden dengan huruf yang akan dimulai dengan huruf A hingga D, diurutkan berdasarkan urutan yang tertera pada Bab III yaitu Metode Penelitian pada bagian Populasi dan Sample.

A. Kebijakan Akuntansi Penjualan Cicilan

Kebijakan akuntansi penjualan cicilan yang akan dianalisis dan dievaluasi dalam bab ini adalah:

1. Penentuan pendapatan penjualan cicilan

2. Pembatalan kontrak dan pemilikan kembali (default dan repossession)

3. Penyajian piutang penjualan cicilan

1. Penentuan Pendapatan Penjualan Cicilan

Dalam hal pengakuan laba penjualan cicilan, seluruh perusahaan responden menerapkan kebijakan pengakuan laba kotor pada saat penjualan. Hal ini dikarenakan kesederhanaan dan kemudahan dalam penerapan metode tersebut dibandingkan dengan metode saat penerimaan kas.

Penentuan pendapatan penjualan cicilan harus didasari oleh kecermatan dan ketepatan, terlebih dengan adanya pendapatan lain yang ditimbulkan oleh penjualan cicilan seperti pendapatan bunga dan pendapatan administrasi. Masing-masing pendapatan harus dicatat pada perkiraan tersendiri agar keakuratan informasi di dalam laporan keuangan terjaga dengan baik.

Kebijakan perusahaan responden dalam menentukan pendapatan penjualan cicilan disajikan pada tabel V.1. Untuk pengakuan pendapatan penjualan cicilan, masing-masing responden telah menerapkan sesuai dengan prinsip yang berlaku, jelasnya pada SAK No. 23.

Tabel V.1
Kebijakan Penentuan Pendapatan Penjualan Cicilan
Pada perusahaan Responden

No	Keterangan	Nomor Populasi			
		A	B	C	D
1	Saat transaksi terjadi :				
	a. Terdapat pengakuan penjualan cicilan	✓	✓	✓	✓
	b. Pengakuan penjualan cicilan sebesar harga jual	✓	×	×	×
2	Pendapatan lain yang ditimbulkan oleh penjualan cicilan:				
	a. pendapatan bunga	✓	✓	✓	✓
	b. pendapatan administrasi	✓	✓	✓	✓
3	Pendapatan bunga dicatat dalam perkiraan tersendiri	✓	×	×	×
4	Pendapatan administrasi dicatat dalam perkiraan tersendiri	✓	×	×	×
5	Pendapatan bunga diakui pada saat penerimaan cicilan	✓	×	×	×
6	Pendapatan administrasi diakui pada saat penerimaan cicilan	✓	×	×	×
7	Pendapatan bunga diakui sebesar jumlah yang telah jatuh tempo	✓	×	×	×
8	Pendapatan administrasi diakui sebesar jumlah yang telah jatuh tempo	✓	×	×	×
9	Pendapatan bunga disajikan dalam kelompok pendapatan lain-lain	✓	×	×	×
10	Pendapatan administrasi disajikan dalam kelompok pendapatan lain-lain	✓	×	×	×
	Jumlah Nilai	12	3	3	3

Sumber: Data Olahan

Keterangan: Tanda ✓ berarti "ya"

Tanda × berarti "tidak"

Tetapi dalam pengukurannya terdapat 3 responden (75% dari populasi) yang kebijakannya tidak sesuai dengan prinsip yang berlaku. Hal ini dikarenakan, ketiga responden mengakui seluruh pendapatan yang akan diterima sebagai penjualan, yang sebenarnya didalam jumlah tersebut terdapat pendapatan bunga dan pendapatan administrasi yang pencatatannya harus dipisahkan dalam perkiraan tersendiri.

Ketidaksesuaian kebijakan oleh ketiga perusahaan responden tersebut juga menimbulkan kesalahan untuk saat pengakuan pendapatan bunga dan pendapatan administrasi serta jumlah yang diakui. Pendapatan bunga dan pendapatan administrasi yang seharusnya diakui pada saat jatuh tempo cicilan atau berlalunya waktu, oleh ketiga perusahaan tersebut diakui pada saat penjualan, dan digabungkan ke dalam satu perkiraan. Dan jumlah yang diakui adalah jumlah keseluruhannya yang akan diterima.

Selanjutnya kesalahan tersebut juga berpengaruh terhadap laporan keuangan, tidak terdapatnya perkiraan pendapatan bunga dan pendapatan administrasi atas penjualan cicilan dalam klasifikasi pendapatan lain-lain.

Untuk menilai kebijakan penentuan pendapatan penjualan cicilan secara umum berdasarkan jawaban responden, digunakan rata-rata hitung:

$$\bar{X} = \frac{12 + 3 + 3 + 3}{4}$$

$$\bar{X} = 5,25$$

Hasil perhitungan dikelompokkan dalam 2 kelompok berdasarkan benar atau tidak kebijakan penentuan pendapatan penjualan cicilan dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Dalam hal ini nilai 12 adalah nilai atas pengelompokkan hasil perhitungan yang merupakan jumlah pertanyaan yang disajikan atas kebijakan ini.

<u>Kelompok</u>	<u>Rata-rata</u>
I	< 12
II	= 12

Kelompok I menunjukkan penerapan kebijakan penentuan pendapatan penjualan cicilan tidak sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku. Sedangkan kelompok II menunjukkan penerapan kebijakan penentuan pendapatan penjualan cicilan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku.

Rata-rata penerapan kebijakan penentuan pendapatan penjualan cicilan responden adalah 5,25. Hasil ini termasuk kelompok I, yang menunjukkan bahwa penerapan kebijakan penentuan pendapatan penjualan cicilan pada perusahaan dagang kendaraan bermotor tidak sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku.

4. Pembatalan Kontrak dan Pemilikan Kembali (Default dan Repossession)

Berdasarkan kebijakan perusahaan dalam pengakuan pendapatan pada saat penjualan, apabila terjadi pembatalan kontrak dan pemilikan kembali maka beberapa hal harus dilakukan, diantaranya:

- a. pencatatan sehubungan dengan pemilikan kembalikendaraan
- b. menghapus saldo piutang penjualan cicilan atas kendaraan yang ditarik kembali
- c. pencatatan keuntungan atau kerugian karena pemilikan kembali

Pada tabel V.2 dapat dilihat kebijakan masing-masing perusahaan responden dalam pembatalan kontrak dan pemilikan kembali.

Dalam pencatatan atas pemilikan kembali dan penghapusan saldo piutang penjualan cicilan atas kendaraan yang ditarik kembali, telah dilaksanakan oleh perusahaan responden sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku. Namun dalam pencatatan keuntungan atau kerugian karena pemilikan kembali, terdapat 2 perusahaan responden (50% dari populasi) yang kebijaksanaannya tidak sesuai dengan prinsip yang

berlaku. Oleh kedua perusahaan, selisih antara saldo piutang penjualan cicilan dengan nilai wajar yang ditetapkan dicatat sebagai beban piutang tidak tertagih.

Tabel V.2

Kebijakan pembatalan kontrak dan pemilikan kembali
Pada perusahaan responden

No	Keterangan	Nomor Populasi			
		A	B	C	D
1	Menghapus saldo perkiraan piutang penjualan cicilan yang berkenaan	✓	✓	✓	✓
2	Penilaian kembali atas kendaraan yang dimiliki kembali	✓	✓	✓	✓
3	Penilaian kembali untuk menentukan nilai wajar	✓	✓	✓	✓
4	Pencatatan sebesar nilai wajar yang telah ditentukan	✓	✓	✓	✓
5	Selisih antara saldo piutang penjualan cicilan dengan nilai wajar yang ditetapkan diakui sebagai rugi/laba karena pemilikan kembali	✓	✓	×	×
	Jumlah Nilai	5	5	4	4

Sumber: Data Olahan

Keterangan: Tanda ✓ berarti "ya"

Tanda × berarti "tidak"

Kebijakan kedua perusahaan tersebut tidak tepat mengingat jangka waktu pelunasan atas penjualan cicilan yang diberikan oleh perusahaan kepada konsumen berkisar

antara 1 hingga 3 tahun. Dengan demikian perkiraan hutang penjualan cicilan yang disajikan dalam laporan keuangan tidak semuanya akan segera jatuh tempo dalam masa 1 tahun atau dalam siklus usaha normal.

Untuk menilai secara umum kebijakan pembatalan kontrak dan pemilikan kembali berdasarkan jawaban responden, digunakan rata-rata hitung:

$$\bar{X} = \frac{5 + 5 + 4 + 4}{4}$$

$$\bar{X} = 4,5$$

Hasil perhitungan dikelompokkan dalam 2 kelompok berdasarkan benar atau tidak kebijakan pembatalan kontrak dan pemilikan kembali dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Dalam hal ini nilai 5 adalah nilai atas pengelompokkan hasil perhitungan yang merupakan jumlah pertanyaan yang disajikan atas kebijakan ini:

Kelompok	Rata-rata
I	< 5
II	= 5

Kelompok I menunjukkan penerapan kebijakan pembatalan kontrak dan pemilikan kembali tidak sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku. Sedangkan kelompok II menunjukkan penerapan kebijakan pembatalan kontrak dan pemilikan kembali sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku.

Rata-rata penerapan kebijakan pembatalan kontrak dan pemilikan kembali responden adalah 4,5. Hasil ini

termasuk kelompok I, yang menunjukkan bahwa penerapan kebijakan pembatalan kontrak dan pemilikan kembali pada perusahaan dagang kendaraan bermotor tidak sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku.

3. Penyajian piutang penjualan cicilan

Menurut prinsip akuntansi yang berlaku, piutang penjualan cicilan dapat disajikan berdasarkan salah satu dari ketiga cara di bawah ini :

- a. penyajian piutang penjualan cicilan secara terpisah dalam kelompok Aktiva Lancar berdasarkan tanggal jatuh tempo tahunnya
- b. penyajian piutang penjualan cicilan tidak secara terpisah dalam kelompok Aktiva Lancar, namun diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan
- c. penyajian piutang penjualan cicilan secara terpisah berdasarkan kelancarannya.

Pada cara ketiga, piutang penjualan cicilan yang jangka waktu pelunasannya tidak lebih dari 1 tahun diklasifikasikan dalam kelompok Aktiva Lancar. Sedangkan yang jangka waktunya lebih dari 1 tahun diklasifikasikan dalam kelompok Aktiva Lain-lain.

Kebijakan penyajian piutang penjualan cicilan oleh perusahaan responden ditampilkan dalam tabel V.3.

Tabel V.3
Kebijakan penyajian piutang penjualan cicilan
Pada perusahaan responden

NO	KETERANGAN	Nomor Populasi			
		A	B	C	D
1	Penyajian piutang penjualan cicilan dalam kelompok aktiva Lancar pada neraca (terpisah):				
	a. piutang cicilan disajikan secara terpisah	✓	-	-	-
	b. pemisahan berdasarkan tanggal jatuh tempo tahunnya	✓	-	-	-
2	Penyajian piutang penjualan cicilan dalam kelompok aktiva Lancar pada neraca (digabungkan):				
	a. piutang cicilan disajikan secara gabungan	-	✓	✓	✓
	b. piutang cicilan akan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan	-	✓	×	×
3	Penyajian piutang penjualan cicilan secara terpisah (dalam kelompok aktiva yang berbeda) pada neraca:				
	a. piutang disajikan atas dasar kelancarannya	-	-	-	-
	b. terdapat piutang yang disajikan pada kelompok Aktiva Lancar	-	-	-	-
	c. terdapat piutang yang disajikan pada kelompok Aktiva Lain-lain	-	-	-	-
	d. piutang cicilan yang jangka waktu pelunasannya tidak lebih dari 1 periode akuntansi dikelompokkan pada Aktiva Lancar	-	-	-	-

e. piutang cicilan yang jangka waktu pelunasannya lebih dari 1 periode akuntansi dikelompokkan pada Aktiva Lain-lain	-	-	-	-
Jumlah Nilai	9	9	8	8

Sumber: Data Olahan

Keterangan: Tanda ✓ berarti "ya"

Tanda ✕ berarti "tidak"

Tanda - berarti tidak ada jawaban

Dari keempat responden terdapat 1 responden (25% dari populasi) yang menerapkan penyajian piutang penjualan cicilan secara terpisah dalam kelompok Aktiva Lancar berdasarkan tanggal jatuh tempo tahunnya, dan 3 responden lainnya (75% dari populasi) menerapkan penyajian piutang penjualan cicilan tidak secara terpisah dalam kelompok Aktiva Lancar.

Kemudian diantara ketiga responden tersebut hanya 1 responden yang mengungkapkan piutang penjualan cicilan dalam catatan atas laporan keuangan. Dengan demikian terdapat 2 responden yang kebijakannya tidak sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku.

Untuk menilai secara umum kebijakan penyajian piutang penjualan cicilan berdasarkan jawaban responden, digunakan rata-rata hitung:

$$\bar{X} = \frac{9 + 9 + 8 + 8}{4}$$

$$\bar{X} = 8,5$$

Hasil perhitungan dikelompokkan dalam 2 kelompok berdasarkan benar atau tidak kebijakan penyajian piutang penjualan cicilan dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Dalam hal ini nilai 9 adalah nilai batas dalam pengelompokkan hasil perhitungan yang merupakan jumlah keseluruhan pertanyaan yang disajikan atas kebijakan ini:

<u>Kelompok</u>	<u>Rata-rata</u>
I	< 9
II	= 9

Kelompok I menunjukkan penerapan kebijakan penyajian piutang penjualan cicilan tidak sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku. Sedangkan kelompok II menunjukkan penerapan kebijakan penyajian piutang penjualan cicilan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku.

Rata-rata penerapan kebijakan penyajian piutang penjualan cicilan responden adalah 8,5. Hasil ini termasuk kelompok I, yang menunjukkan bahwa penerapan kebijakan penyajian piutang penjualan cicilan pada perusahaan dagang kendaraan bermotor tidak sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku.

B. Analisis Penerapan Akuntansi Penjualan Cicilan

Berdasarkan hasil jawaban responden terhadap tiga kebijakan akuntansi penjualan cicilan yaitu : penentuan pendapatan penjualan cicilan, pembatalan kontrak dan pemilikan kembali (default dan repossession), penyajian piutang penjualan cicilan , maka diperoleh total nilai masing-masing perusahaan. Hasil perhitungan nilai yang diperoleh oleh masing-masing perusahaan dapat dilihat pada tabel V.4.

Tabel V.4

Perhitungan nilai masing-masing perusahaan responden
Atas kebijakan akuntansi penjualan cicilan

NO	KETERANGAN	Nomor Populasi			
		A	B	C	D
1	Penentuan pendapatan penjualan cicilan	12	3	3	3
2	Pembatalan kontrak & pemilikan kembali	5	5	4	4
3	Penyajian piutang penjualan cicilan	9	9	8	8
	Jumlah Nilai	26	17	15	15

Sumber: Data Olahan

Untuk melihat secara umum atas analisis penerapan kebijakan akuntansi persediaan dari jawaban responden digunakan rata-rata hitung:

$$\bar{X} = \frac{26 + 17 + 15 + 15}{4}$$

$$\bar{X} = 18,25$$

Hasil perhitungan rata-rata dikelompokkan dalam dua kelompok sesuai dengan benar atau tidaknya penerapan kebijakan akuntansi penjualan cicilan dengan prinsip akuntansi yang berlaku. Dan nilai 26 adalah nilai batas pengelompokkan yang merupakan jumlah keseluruhan pertanyaan yang disajikan atas kebijakan akuntansi penjualan cicilan :

Kelompok	Rata-rata
I	< 26
II	= 26

Kelompok I menunjukkan penerapan akuntansi penjualan cicilan tidak sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku. Sedangkan kelompok II menunjukkan penerapan akuntansi penjualan cicilan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku.

Hasil perhitungan rata-rata dari penerapan akuntansi penjualan cicilan adalah 18,25. Hasil ini termasuk kelompok I, yang menunjukkan bahwa penerapan akuntansi penjualan cicilan pada perusahaan dagang kendaraan bermotor di Kotip Tanjungpinang tidak sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku.